HUBUNGAN PARTAI POLITIK DAN *WELFARE STATE* DALAM NEGARA PANCASILA

Ismarini Della Purnama [1] dan Ahmad Ahsin Thohari [2]
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
ismarinidp@gmail.com, ahmadahsint@upnvj.ac.id

Abstract

This study examines the relationship between political parties and the concept of the welfare state within the context of the Pancasila state. The welfare state in Indonesia is rooted in Pancasila values, particularly the fifth principle, which emphasizes social justic. Political parties play a central role in formulating policies that support social welfare but face various challenges, such as economic inequality, corruption, and populist politics. This research uses a literature review method to analyze how political party ideologies influence the formulation of welfare policies and how the implementation of these policies is hindered by political and structural factors. The results indicate that despite the formultaion of various welfare policies, their success is often hampered by inconsistency, budget limitations, and political fragmentation due to the multiparty system. Therefore, it is crucial for political parties in Indonesia to continuously strive to create sustainable social welfare through inclusive and measurable policies.

Keywords: *Political Parties; Welfare State; Pancasila and Social Policy.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara partai politik dan konsep negara kesejahteraan *(welfare state)* dalam konteks Negara Pancasila. Negara kesejahteraan di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang menekankan keadilan sosial. Partai politik memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial, namun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan politik populis. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis bagaimana ideologi partai politik mempengaruhi formulasi kebijakan kesejahteraan, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dihambat oleh berbagai faktor politik dan struktural. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun berbagai kebijakan kesejahteraan telah dirumuskan, keberhasilannya sering kali terhambat oleh kurangnya konsistensi, keterbatasan anggaran, serta fragmentasi politik akibat sistem multipartai. Dengan demikian, penting bagi partai politik di Indonesia untuk terus berupaya menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan melalui kebijakan yang inklusif dan terukur.

Kata Kunci: Partai Politik; Negara Kesejahteraan; Pancasila dan Kebijakan.

A. Pendahuluan

Partai politik memainkan peran sentral dalam sistem pemerintahan demokratis, berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem Pancasila sebagai dasar negara, keberadaan partai politik tidak hanya menjadi sarana untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan negara kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan merupakan sistem yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya melalui intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara partai politik dan negara kesejahteraan dalam konteks Pancasila.[1]

Di tingkat global negara kesejahteraan telah menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi politik. Banyak negara mengadopsi model negara kesejahteraan dengan harapan untuk mengurangi kemiskninan, meingkatkan kualitas hidup, dan memberikan akses layanan publik yang lebih baik. Namun, implementasi model ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor termasuk kebijakan politik, ideologi, dan dinamika kekuasaan partai politik. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, ekonomi, dan sosial menghadapi tantangan unik dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. [2]

Partai politik politik di Indonesia memiliki ideologi yang beragam, yang tercermin dalam platform dan kebijakan mereka. Ideologi ini memengaruhi cara mereka merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, partai yang lebih fokus pada isu-isu sosial cenderung mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, sementara partai dengan orientasi ekonomi mungkin lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Perbedaan ideologi ini berkontribusi pada bagaimana masing-masing partai berperan dalam membentuk negara kesejahteraan dan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. [3]

Masalah khusus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana partai politik berinteraksi dengan berbagai elemen negara kesejahteraan dalam konteks Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan partai politik dan realisasi negara kesejahteraan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara partai politik dan negara kesejahteraan dalam kerangka Pancasila. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman teoritis tentang hubungan tersebut, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan partai politik dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ideologi partai politik

[1] Sindi Fitria and Tundjung Herning Sitabuana, "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2. 2021.

[2] Aniken Yustisia Syahnaz, "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna," *Spektrum Hukum* 18, no. 1. 2021.

[3] Adjie Hendrawan, "Analisis Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Demokrasi Dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3. 2021.

mempengaruhi formulasi kebijakan kesejahteraan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut dihambat oleh berbagai faktor politik dan struktural?

B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai hubungan antara partai politik dan negara kesejahteraan *(welfare state)* dalam konteks Negara Pancasila menggunakan studi literatur terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai sumber yang relevan, sesuai dengan penjelasan bahwa studi literatur merupakan langkah awal penting dalam penelitian sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menilai informasi secara sistematis dan menyeluruh.[4]

Proses evaluasi ini meliputi analisis kualitas, kredibilitas, dan relevansi sumber, sebagaimana yang telah di uraikan bahwa penilaian kritis sumber sangat diperlukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.[5]

Metode analisis yang digunakan bersifat komparatif dan tematik, mengikuti yang menekankan pentingnya mengidentifikasi pola-pola tematik dari literatur yang dikaji, serta melakukan perbandingan lintas sumber untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.[6] Pendekatan ini diperkuat bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti menyintesiskan temuan dari berbagai literatur secara kritis dan sistematis.[7]

Evaluasi ini juga mencakup pemahaman mengenai posisi ideologis atau kepentingan politik penulis dalam menyusun karya tersebut. Peneliti akan menilai bagaimana berbagai literatur menggambarkan hubungan antara partai politik dan kebijakan kesejahteraan sosial, serta bagaimana masing-masing partai politik menafsirkan dan mengaplikasikan konsep negara kesejahteraan dalam kerangka Pancasila. Literatur yang berisi kajian empiris tentang pengaruh kebijakan partai politik terhadap kesejahteraan sosial di negara-negara lain juga akan dievaluasi untuk melihat relevansinya terhadap konteks Indonesia.

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap literatur yang telah dievaluasi. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan komparatif dan tematik. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan partai politik di Indonesia yang berkaitan dengan negara kesejahteraan dengan kebijakan serupa di negara lain. Hal ini membantu dalam melihat kesamaan dan perbedaan dalam model implementasi negara kesejahteraan, terutama dalam konteks peran partai politik.

Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu mengenai hubungan partai politik dan negara kesejahteraan, serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam kerangka ideologis Pancasila.

Setelah melakukan analisis terhadap literatur, langkah selanjutnya adalah menyusun sintesis temuan dari literatur yang telah dikaji. Sintesis ini berfungsi untuk merangkum pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, sintesis akan mencakup bagaimana partai politik di Indonesia mempengaruhi kebijakan negara kesejahteraan, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan tersebut. Sintesis juga akan menjelaskan apakah ada kesenjangan atau ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan negara kesejahteraan oleh partai politik di Indonesia. Peneliti akan menyatukan temuan-temuan yang ada ke dalam satu kerangka teori yang solid, memberikan pandangan kritis mengenai sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila

[4] Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* Alfabeta, Bandung.
[5] Moh Nazir, 2019, *Metode Penelitian* Ghalia Indonesia, Bogor.
[6] Lexy J Moleong, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif* PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
[7] Sari Biklen, Robert C, and Bogdan, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Pustaka Pelajar.

berhasil diimplementasikan dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Langkah terakhir dalam metode studi literatur adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

Selanjutnya, prosedur penelitian dijalankan berdasarkan panduan yang menekankan pentingnya tahapan sistematis mulai dari pengumpulan data literatur, evaluasi, analisis, hingga penyusunan sistetis temuan.[8] Keseluruhan metode ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid mengenai hubungan antara partai politik dan negara kesejahteraan dalam konteks pancasila.

C. Pembahasan

A. Partai Politik di Indonesia Memformulasikan Kebijakan yang Mendukung Pembentukan Negara Kesejahteraan *(Welfare State)* Sesuai dengan Prinsip Pancasila.

Partai politik di Indonesia memainkan peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik, termasuk kebijakan yang mendukung pembentukan negara kesejahteraan (welfare state) sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah. Setiap partai politik memiliki ideologi yang beragam, namun secara keseluruhan, mereka diwajibkan untuk berpegang pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang mendorong pembentukan sistem negara kesejahteraan yang adil dan inklusif. [9]

Proses formulasi kebijakan negara kesejahteraan oleh partai politik di Indonesia dimulai dengan penetapan platform politik dan visi-misi partai yang mencerminkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat. Partai politik dengan orientasi sosial-demokrat, misalnya, cenderung mendorong kebijakan yang mendukung redistribusi ekonomi, peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Sebaliknya, partai dengan pendekatan liberal ekonomi mungkin lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan peran sektor swasta dalam menyediakan layanan kesejahteraan, dengan tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip Pancasila. [10]

Dalam merumuskan kebijakan tersebut, partai politik juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial Indonesia yang sangat beragam. Karena itu, kebijakan kesejahteraan yang diformulasikan sering kali berusaha untuk menjawab isu-isu spesifik, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan akses yang tidak merata terhadap layanan publik. Partai politik bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan ahli kebijakan, untuk merumuskan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil tetap berpedoman pada nilai gotong royong dan musyawarah mufakat, yang merupakan bagian dari Pancasila.

Selain itu, partai politik di Indonesia berperan dalam proses legislasi, di mana mereka memperjuangkan kebijakan kesejahteraan melalui perdebatan di parlemen. Kebijakan-kebijakan yang diusulkan partai politik harus melalui mekanisme perundang-

[8] Suharsimi Arikunto, 2025, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

[9] Mochammad Farisi and Rahayu Repindowaty Harahap, "Politik Hukum Sistem Rekrutmen Politik Yang Ideal Berdasarkan UDHR & Nilai Pancasila," *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 13, no. 1, 2024.

[10] Khoirul Umam and Achmad Jalaludin, "Umer Chapra's Critique of The Western Concept of Welfare State," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 11, no. 2, 2023.

undangan yang melibatkan diskusi antarpartai, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kepentingan partai tertentu, tetapi juga sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip Pancasila. Melalui proses ini, kesejahteraan sosial dijadikan prioritas bersama.

Partai politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memformulasikan dan menerapkan kebijakan negara kesejahteraan (welfare state) yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di berbagai daerah. Meskipun Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, realitas menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial masih belum merata. Partai politik harus merumuskan kebijakan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang. Kebijakan yang inklusif, seperti program bantuan sosial dan perbaikan infrastruktur, menjadi krusial untuk mempersempit kesenjangan tersebut.

Selain tantangan ketimpangan, korupsi dan birokrasi yang berbelit juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan kesejahteraan. Partai politik yang memiliki kekuasaan di pemerintahan sering kali harus berhadapan dengan praktik-praktik korupsi yang menghambat penyaluran anggaran untuk program kesejahteraan. Oleh karena itu, selain merumuskan kebijakan yang tepat, partai politik juga harus memastikan adanya sistem pengawasan yang kuat agar anggaran kesejahteraan dapat terserap dengan baik dan tidak disalahgunakan. Reformasi birokrasi menjadi isu penting yang perlu diperjuangkan oleh partai politik agar kebijakan negara kesejahteraan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. [11]

Ideologi partai politik juga mempengaruhi bagaimana kebijakan kesejahteraan diformulasikan. Beberapa partai mungkin lebih menekankan pentingnya intervensi negara yang kuat dalam mengatur dan menyediakan layanan kesejahteraan, sementara partai lain mungkin lebih mendorong peran sektor swasta atau kerjasama publik-swasta dalam penyediaan layanan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan ideologi, semua partai politik di Indonesia pada dasarnya harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada keseimbangan antara peran negara dan gotong royong masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Peran partai politik juga penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan kesejahteraan. Kebijakan negara kesejahteraan tidak hanya harus dirumuskan dengan baik, tetapi juga harus mampu bertahan dalam jangka panjang, melampaui masa jabatan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan tidak hanya bersifat populis untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga dirancang dengan visi jangka panjang yang berkelanjutan. Stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa negara kesejahteraan dapat berkembang di Indonesia sesuai

[11] Hafizh Arifin, "Politik Hukum Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia," *Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2, 2023.

dengan prinsip Pancasila.

B. Peran Ideologi Partai Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Ideologi partai politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia, karena ideologi tersebut menjadi landasan utama bagi partai dalam menentukan prioritas kebijakan. Ideologi partai mencerminkan pandangan mereka terhadap peran negara, masyarakat, dan individu dalam mengelola kesejahteraan sosial. Partai dengan ideologi yang lebih condong ke sosialisme atau demokrasi sosial, misalnya, cenderung mendorong intervensi pemerintah yang lebih besar dalam bidang kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebaliknya, partai dengan ideologi liberal biasanya lebih menekankan pada mekanisme pasar dan peran sektor swasta dalam memberikan layanan sosial, meskipun tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial yang tertanam dalam Pancasila.

Perbedaan ideologi ini tercermin dalam kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik di Indonesia. Partai-partai yang memiliki orientasi lebih sosial-demokrat akan mendukung kebijakan redistribusi kekayaan melalui program bantuan sosial, subsidi pemerintah, dan perluasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Mereka percaya bahwa negara harus memainkan peran sentral dalam menjamin kesejahteraan seluruh warganya, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang menekankan perlunya peran negara dalam menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan untuk semua. [12]

Partai politik yang lebih berorientasi liberal atau konservatif akan mendorong kebijakan yang memungkinkan masyarakat dan sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam kesejahteraan sosial. Mereka mungkin mendukung kebijakan yang memberikan insentif kepada sektor swasta untuk berinvestasi dalam penyediaan layanan kesehatan atau pendidikan, dengan keyakinan bahwa pendekatan berbasis pasar dapat lebih efisien dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, partai-partai ini tetap diharuskan mengikuti kerangka Pancasila, yang mengharuskan kesejahteraan sosial diutamakan tanpa mengabaikan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, ideologi partai politik juga mempengaruhi bagaimana mereka memandang peran masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Partai dengan ideologi yang lebih egaliter mungkin akan mempromosikan kebijakan gotong royong dan solidaritas sosial, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam membantu sesama, seperti melalui program-program komunitas atau koperasi. Di sisi lain, partai yang berorientasi lebih individualistik mungkin akan mendorong kebijakan yang mempromosikan tanggung jawab individu atas kesejahteraannya sendiri, meskipun tetap ada dukungan minimal dari pemerintah bagi mereka yang paling rentan.

Ideologi partai politik yang beragam juga mempengaruhi bagaimana partai-partai tersebut memprioritaskan sektor-sektor tertentu dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Misalnya, partai

[12] Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1, 2021.

yang berideologi nasionalis mungkin lebih fokus pada kesejahteraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional, seperti program ketahanan pangan atau pembangunan infrastruktur yang memperkuat persatuan bangsa. Di sisi lain, partai dengan ideologi agama akan lebih memperhatikan aspek moral dan etika dalam kebijakan kesejahteraan, dengan menekankan nilai-nilai agama dalam program-program sosial, seperti zakat, infaq, dan wakaf, sebagai bagian dari sistem kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Perbedaan ideologi juga tercermin dalam cara partai politik membangun program kesejahteraan sosial yang bersifat inklusif atau eksklusif. Partai yang memiliki pandangan inklusif cenderung mendorong kebijakan yang mencakup semua lapisan masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Program seperti bantuan sosial tunai atau akses universal terhadap layanan kesehatan adalah contoh kebijakan yang inklusif. Sementara itu, partai yang berorientasi lebih eksklusif mungkin lebih fokus pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok yang dianggap sebagai basis pemilih utama mereka. Namun, meskipun perbedaan ini ada, semua kebijakan kesejahteraan yang dirumuskan harus tetap sejalan dengan prinsip Pancasila, yang menekankan persatuan dan kesejahteraan bersama. [13]

Selain itu, ideologi partai politik mempengaruhi pendekatan mereka terhadap pendanaan dan alokasi anggaran untuk program kesejahteraan sosial. Partai yang lebih mendukung intervensi negara biasanya akan mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor-sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Mereka akan mendesak adanya reformasi pajak atau kebijakan fiskal yang lebih progresif untuk mendanai program-program kesejahteraan. Sebaliknya, partai yang lebih konservatif dalam hal ekonomi mungkin akan lebih mengutamakan efisiensi anggaran, mendorong kebijakan pengurangan subsidi, atau mencari cara lain untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pendanaan program kesejahteraan.

C. Tantangan yang Dihadapi Partai Politik dalam Mengimplementasikan Kebijakan Negara Kesejahteraan di Indonesia.

Salah satu tantang utama yang dihadapi partai politik dalam mengimplementasikan kebijakan negara kesejahteraan di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi yang masih sangat tinggi. Meski berbagai program kesejahteraan telah diluncurkan, perbedaan akses terhadap sumber daya antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin, tetap menjadi hambatan serius.

Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sering kali tidak sampai ke kelompok yang paling membutuhkan. Partai politik harus menghadapi kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda-beda, yang mampu merespons kebutuhan khusus setiap daerah. Selain itu, korupsi yang masih meluas dalam pemerintahan menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan kesejahteraan.

Banyak program kesejahteraan yang dijalankan tidak mencapai tujuan karena adanya penyelewengan dana atau praktik korupsi di tingkat

[13] Beno Bahari and Gusliana HB, "Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2, 2023.

birokrasi. Partai politik, terutama yang berkuasa, sering kali sulit mengawasi pelaksanaan kebijakan mereka di lapangan secara efektif. Hal ini menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan layanan sosial secara adil dan transparan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan perlu menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa anggaran kesejahteraan dapat terserap dan digunakan dengan optimal. [14]

Tantangan lain adalah masalah populisme dalam politik. Partai politik, terutama menjelang pemilihan umum, sering kali lebih fokus pada kebijakan yang bersifat populis dan jangka pendek daripada kebijakan yang berkelanjutan. Mereka cenderung mengutamakan program-program yang dapat menarik perhatian publik dengan cepat, seperti bantuan langsung tunai, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya. Akibatnya, kebijakan kesejahteraan yang seharusnya dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap kemiskinan dan ketimpangan sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang sementara. Ini menciptakan tantangan bagi partai politik untuk mengimbangi antara kebutuhan mendesak dan strategi Pembangunan yang berkelanjutan.

Pendanaan juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan negara kesejahteraan. Anggaran yang terbatas sering kali membuat partai politik harus memilih prioritas dalam menjalankan program kesejahteraan. Sementara kebutuhan akan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sangat besar, kemampuan fiskal negara sering kali tidak mencukupi untuk mendanai semua program yang diinginkan. Partai politik harus menghadapi kenyataan bahwa untuk mendanai program kesejahteraan, mereka mungkin harus mengorbankan proyek-proyek lain atau meningkatkan pajak, yang bisa jadi tidak populer di kalangan masyarakat. [15]

Partai politik juga menghadapi tantangan dalam membangun konsensus di antara berbagai kepentingan politik dan sosial. Sistem politik Indonesia yang multipartai sering kali membuat kebijakan kesejahteraan sulit diterapkan secara konsisten, karena adanya perbedaan pandangan antarpartai dalam merumuskan prioritas kesejahteraan. Koalisi yang lemah atau tidak solid dalam pemerintahan sering kali mengakibatkan kebijakan kesejahteraan terhambat atau terfragmentasi. Dalam hal ini, partai politik perlu lebih aktif dalam membangun dialog dan kerja sama lintas partai untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan efektif dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara partai politik dan negara kesejahteraan (welfare state) dalam kerangka Negara Pancasila sangat dipengaruhi oleh ideologi dan

[14] Grelyano Beryl Mahupale et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Jabatan Menteri Yang Dijabat Oleh Ketua Partai Politik," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2, 2022.

[15] Laga Sugiarto, "Perbandingan Sistem Merit Di Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Solidaritas Indonesia (Comparison of Merit System in Prosperous Justice Party and Indonesian Solidarity Party)," *Jurnal Hukum in Concreto*, no. September, 2022.

kebijakan partai-partai politik yang berperan di dalamnya. Partai politik, melalui perannya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan, memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pancasila, khususnya sila kelima.

Namun, dalam prakteknya, partai politik di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kesenjangan ekonomi, korupsi, politik populis, keterbatasan anggaran, serta dinamika politik multipartai, dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dan upaya membangun konsensus lintas partai, partai-partai politik dapat berkontribusi signifikan dalam membangun negara kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2025. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Biklen, Sari, Robert C, dan Bogdan. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Arifin, Hafizh. "Politik Hukum Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2. 2023.

Bahari, Beno, and Gusliana HB. "Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2. 2023.

Farisi, Mochammad, and Rahayu Repindowaty Harahap. "Politik Hukum Sistem Rekrutmen Politik Yang Ideal Berdasarkan UDHR & Nilai Pancasila." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 13, no. 1. 2024.

Fitria, Sindi, and Tundjung Herning Sitabuana. "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2. 2021.

Hendrawan, Adjie. "Analisis Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Demokrasi Dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3. 2021.

Khoirul Umam, and Achmad Jalaludin. "Umer Chapra's Critique of The Western Concept of Welfare State." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 11, no. 2. 2023.

Mahupale, Grelyano Beryl, Salmon Eliazer, Marthen Nirahua, and Sherlock Halmes Lekipiouw. "Tinjauan Yuridis Terhadap Jabatan Menteri Yang Dijabat Oleh Ketua Partai Politik." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2. 2022.

Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1. 2021.

Sugiarto, Laga. "Perbandingan Sistem Merit Di Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai

Solidaritas Indonesia (Comparison of Merit System in Prosperous Justice Party and Indonesian Solidarity Party)." *Jurnal Hukum in Concreto*, no. September. 2022.

Syahnaz, Aniken Yustisia. "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna." *Spektrum Hukum* 18, no. 1. 2021.